

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wilayah perkotaan merupakan pusat aktivitas sosial ekonomi bukan saja bagi penduduk yang tinggal di kota tersebut tetapi juga bagi penduduk yang tinggal di sekitar kota tersebut. Perkotaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah tempat berpusatnya penduduk dalam jumlah banyak, tapi juga di sana berpusat berbagai kegiatan, seperti pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian, transportasi, komunikasi dan jasa lainnya, sehingga tidak heran kalau perkotaan berfungsi sebagai *growth pole* dan *center place*. Akibat dari pemusatan berbagai kegiatan seperti penduduk, pemerintahan, perdagangan, perindustrian, transportasi, komunikasi dan jasa lainnya tersebut menjadikan wilayah perkotaan berkembang lebih pesat daripada daerah di sekitar kota tersebut.

Perkembangan wilayah, khususnya kota terus mengalami pertumbuhan yang pesat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang dan mobilitasnya. Perkembangan wilayah juga menyebabkan terjadinya penambahan dan perluasan sarana dan prasarana sosial yang membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang baik untuk melayani kebutuhan mobilitas penduduknya. Salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, adalah Kota Cimahi dimana Cimahi sebagai sebuah kota terus mengalami pertumbuhan yang pesat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang dan mobilitasnya.

Secara geografis Kota Cimahi terletak diantara  $107^{\circ} 30' 30''$  BT –  $107^{\circ} 34' 30''$  dan  $6^{\circ} 50' 00''$  –  $6^{\circ} 56' 00''$  Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara  $\pm 1,040$  meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar  $\pm 685$  meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Ci tarum. Dengan suhu udara rata-rata pada tahun 2004 berkisar antara  $18^{\circ}\text{C}$  –  $29^{\circ}\text{C}$ . Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan.

Luas wilayah Kota Cimahi  $40,2$  Km<sup>2</sup> menurut UU No. 9 Tahun 2001 dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marga Asih Kulon Kota Bandung, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung.
- Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung.

Sumber : BPS Kota Cimahi 2004.

Awal perkembangan Cimahi dimulai sebagai pusat militer pada jaman kolonial Belanda yang menjadi daya tarik tumbuhnya Kota Cimahi dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas militer dan sarana penunjang lainnya, untuk mengimbangi kegiatan militer kemudian pemerintahan Belanda membentuk pemerintahan setingkat Kecamatan. Dalam perkembangannya Cimahi ditingkatkan menjadi kewedanaan yang berfungsi melaksanakan tugas pemerintahan pusat di daerah sampai terjadinya peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia.

Dengan adanya sistem pemerintahan baru yang diterapkan pemerintahan Indonesia, kewedanaan Cimahi dihapuskan selanjutnya dibentuk koordinator wilayah Cimahi yang membawahi tiga kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Padalarang
2. Kecamatan Batujajar
3. Kecamatan Cipatat

Seiring perkembangan, dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya yang dibawah oleh Kecamatan Cimahi pada waktu itu yaitu : Kecamatan Padalarang, Batujajar, dan Cipatat. Kecamatan Cimahi memiliki tingkat perkembangan yang lebih pesat karena didukung oleh letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, serta adanya pusat industri di Leuwigajah dan pusat perdagangan di Gandawijaya dan berkembangnya sektor perumahan menjadikan Cimahi sebagai pusat pelayanan bagi wilayah kabupaten daerah tingkat II Bandung bagian barat.

Dengan perkembangan pesat yang dialami oleh Cimahi dan keluarnya undang-undang nomor 5 tahun 1974, maka pada tanggal 29 Januari 1976 Cimahi diresmikan menjadi Kota Administratif pertama di Jawa Barat. (Sumber : Pemerintah Kota Cimahi 2001).

Seiring dengan berjalannya waktu, Cimahi berkembang dengan cepat sampai pada akhirnya tanggal 21 Juni 2001, Cimahi berubah status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001. (Sumber : Pemerintah Kota Cimahi 2001).

Setelah perubahan status kota yang dialami Cimahi, mulai pada saat itu pembangunan sarana dan prasarana umum semakin meningkat, kebutuhan tersebut didasarkan atas permintaan penduduk yang mendesak serta fungsinya yang sangat penting bagi penduduk Kota Cimahi, seperti pembangunan jalan, terminal, gedung perkantoran, pemerintah maupun swasta, pasar, sarana pendidikan dan lain-lain.

Dilihat dari fungsi kota dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota dan Kab. Bandung, Kota Cimahi memiliki peran dan posisi sebagai wilayah penyangga Kota Bandung. Hal ini ditandai dengan adanya pusat industri di Leuwigajah dan pusat perdagangan di Gandawijaya yang merupakan penyokong sektor industri dan ekonomi baik bagi Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung serta berkembangnya sektor perumahan di Cimahi menjadikan Cimahi sebagai pusat pelayanan bagi wilayah Kabupaten Bandung bagian barat maupun Kota Bandung.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduknya, Kota Cimahi tumbuh dan berkembang dengan pesat baik fungsi maupun aktivitas kota, migrasi sirkuler / perpindahan penduduk secara lokal dari daerah-daerah lain diluar Kota Cimahi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Cimahi.

Perkembangan Kota Cimahi seiring pertumbuhan penduduk, membawa pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan akan lahan hunian (pemukiman), transportasi, kesehatan, pendidikan, serta fasilitas lain yang mendukung kelangsungan kehidupan sosial ekonomi penduduk Kota Cimahi tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Partoatmodjo (1991:68) : ‘makin meningkat jumlah penduduk maka akan makin meningkat pula kebutuhan akan lahan yang merupakan tempat dimana manusia melakukan segala aktivitasnya’.

Permasalahan yang kini sedang dihadapi adalah perubahan fisik penggunaan lahan dan perubahan fungsi pada bangunan serta masalah transportasi kota dimana perluasan sarana dan prasarana sosial seperti pemukiman, pemerintahan, perdagangan, perindustrian, komunikasi dan jasa lainnya akan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk melayani kebutuhan penduduknya secara optimal, dan apabila sarana dan prasarana transportasi ini tidak sesuai atau kurang dengan kebutuhan maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas, sehingga pemenuhan kebutuhan penduduk akan terhambat yang pada gilirannya akan menghambat perkembangan Kota Cimahi itu sendiri.

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan pula terjadinya pergeseran penggunaan lahan. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya penghuni kota, baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, yang pada gilirannya akan membuat penambahan dan perluasan sarana dan prasarana sosial seperti pemerintahan, perdagangan, perindustrian, transportasi, komunikasi dan jasa lainnya.

Berdasarkan latar belakang kondisi geografis diatas tentunya kesemuanya akan mempengaruhi Kota Cimahi itu sendiri dimana Kota Cimahi diharapkan dapat berfungsi dan berperan sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang diarahkan dapat melayani kebutuhan penduduknya secara optimal, dalam hal ini kebutuhan akan kelancaran mobilitas penduduknya.

Atas alasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kajian kemacetan lalu lintas di Kota Cimahi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari terjadinya perluasan permasalahan, untuk itu dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor geografi apakah yang menyebabkan kemacetan di Kota Cimahi ?
2. Sejauh mana pengaruh unsur – unsur geografis Kota Cimahi terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Cimahi ?
3. Bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Kota Cimahi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tetap bertolak dari perumusan masalah diantaranya :

1. Menganalisis dan memperoleh data yang aktual serta objektif mengenai faktor-faktor geografi yang menyebabkan kemacetan di Kota Cimahi.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh unsur – unsur geografis Kota Cimahi terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Cimahi.
3. Mengevaluasi usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Kota Cimahi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperoleh data atau informasi mengenai faktor-faktor geografi yang menyebabkan kemacetan di Kota Cimahi.
2. Diperoleh gambaran sejauh mana pengaruh unsur – unsur geografis Kota Cimahi terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Cimahi.
3. Diperoleh gambaran mengenai usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Kota Cimahi.

## 1.5 Definisi Operasional

Maksud dari judul penelitian “Kajian Kemacetan Lalu Lintas di Kota Cimahi” ini, adalah sebagai berikut :

### 1. Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas merupakan suatu keadaan kondisi jalan bila tidak ada keseimbangan antara kapasitas jalan (C) dengan jumlah kendaraan yang lewat (Volume / V). Gejala ini ditandai dengan kecepatan yang rendah sampai berhenti, jarak antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain rapat, pengemudi tidak dapat menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang diinginkan (Djamester dalam Yuliarti 2004).

Kemacetan lalu lintas merupakan akibat dari besarnya volume lalu lintas yang tidak mampu diakomodasi oleh ruas jalan yang mengakibatkan tingginya waktu perjalanan dan rendahnya kecepatan rata-rata. Kemacetan lalu lintas (congestion) di jalan terjadi karena ruas jalan tersebut sudah mulai tidak mampu menerima /melewatkan luapan arus kendaraan yang datang secara lancar. Kemacetan lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Cimahi.

### 2. Kota

Rumusan kota menurut Bintarto (1984:36) sebagai berikut :

“Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.”



Pengertian kota di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1980, bahwa kota mengandung dua pengertian; pertama kota sebagai suatu wadah yang memiliki batasan administratif sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan; kedua kota sebagai suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pemukiman. Adapun Kota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kota Cimahi yang termasuk dalam wilayah propinsi Jawa Barat.

